

KONSEP KOMUNIKASI JURGEN HABERMAS DALAM IDE DEMOKRASI DELIBERATIF DAN TINDAKAN KOMUNIKATIF

Muhammad Ersyad Muttaqien¹, Deden Ramdan²

Universitas Pasundan^{1,2}

E-mail : ersyad.muttaqien@unpas.ac.id, de2nramdan@yahoo.co.id

ABSTRACT

Jurgen Habermas is one of social science scholars in Frankfurt school. He has main focus to manifest deliberative democracy in which public participation is regarded as the rights of communication. Moreover, it is supposed to value justice, eliminate destructive domination, and manifest consensus. The research method employs descriptive analysis and It employs Habermas communication theory consisted of 1) basic communication, 2) political communication, 3) press system, and 4) communication competence. The result shows that the theory holds the principal of human rights, the technique of discussion and the implementation of social network either cultural or structural. The conclusion of this research is Habermas avoids communication exploiting human and proposing a certain kind of communication. Therefore, those orientations produce equality, high value of human rights, and transformative communication.

Keywords : Jurgen Habermas, Deliberative Democracy, Communication Concept, Communication Action.

I. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah ilmu, komunikasi telah memberikan banyak sumbangan informasi pengetahuan kepada institusi ilmu formal (lembaga Pendidikan) ataupun kepada masyarakat pada umumnya dalam rangka menghadirkan kehidupan interaksi sosial yang harmonis. Proses penyebaran ilmu komunikasi tidak terlepas dari banyak tokoh-tokoh penting yang memberikan perspektif kedalaman ilmu komunikasi.

Salah satu tokoh yang memberikan pengaruh perspektif terhadap khazanah ilmu komunikasi yakni Jurgen Habermas, dikenal memiliki segmentasi pengembangan ilmu komunikasi pada *mazhab* Frankfurt (*Die Frankfurter Schule*). Dia merupakan generasi kedua dari *mazhab* Frankfurt juga penerus dari para teoritikus kritis seperti Max Horkheimer (1895-1973), Theodor Adorno (1903-1969), dan Hebert Marcuse (1898-1979). Teori kritis Frankfurt menghendaki adanya metode diskursus dialektis yang diterapkan pada fenomena sosial.

Sementara Habermas lebih spesifik menambahkan paradigma komunikasi di dalam teori kritis.

Habermas melihat metode dialektis dalam teori kritis yang dipadukan dengan komunikasi sebagai sebuah upaya untuk membangun pengertian yang solid antara komunikator dan komunikan menghadirkan rasa saling memahami satu sama lain dan tidak bersifat instrumental atau pemaksaan kehendak untuk menerima sebuah kenyataan dalam fenomena sosial. Sehingga dalam praktiknya komunikasi dipandang sebagai upaya terus menerus untuk membangun pengertian antar manusia. Dalam pengertian yang sederhana Habermas ingin mengatakan bahwa komunikasi adalah upaya untuk menciptakan konsensus.

Titik fokus dalam membentuk komunikasi yang efektif yaitu dengan mengedepankan rasio (akal pikiran), Habermas menyebutnya sebagai *faith in reason* (kepercayaan kepada kekuatan rasio). Konsep rasio yang digagas oleh

Habermas sangat spesifik yaitu bagaimana rasio harus mampu menangkap realitas manusia dan kemanusiaan. Berlawanan dengan kaum positivis yang menggunakan rasio sebagai alat instrumental atau alat untuk mencapai tujuan-tujuan material namun mengenyampingkan aspek-aspek kemanusiaan, rasio hanya digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, obyektifikasi; bagaimana obyek (baca: manusia) dimanipulasi untuk 'kepentingan' tertentu dan menghilangkan sifat dasar manusia yang dinamis.

Kaum Positivis menilai bahwa fenomena interaksi manusia bisa ditinjau dengan pendekatan metode ilmu alam, bagi Habermas itu merupakan kesalahan fatal, dalam melihat manusia dan kemanusiaan perlu penelitian total yang didalamnya mengandung unsur-unsur fenomena kehidupan manusia yang saling bernegasi, saling berkontradiksi dan saling bermediasi. Habermas secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa pendekatan-pendekatan ilmu sosial dianggap lebih tepat untuk mengungkap fenomena relasi-interaksi antar manusia.

Habermas ada pada dua dimensi praksis dalam memahami manusia dan fenomenanya yakni 1) pekerjaan dan 2) komunikasi, kedua hal tersebut menurutnya merupakan tindakan dasar manusia yang menentukan bagaimana manusia sebagai makhluk bergerak dan hidup di dalam dunianya. Pekerjaan adalah sebuah tindakan instrumental untuk mencapai sesuatu, sedangkan komunikasi adalah tindakan untuk saling berpengertian.

Teori Kritis khas Habermas ingin membuat sebuah peta jalan perubahan sosial yang dihiasi dengan semangat konsensus dan komunikasi, hal ini tentunya bertolakbelakang dengan apa yang

diajarkan oleh Karl Marx sebagai guru dalam teori kritis pada konteks perubahan sosial yang menempuh jalan konflik revolusioner.

Konsensus dan komunikasi bagi Habermas merupakan jalan keluar dari realita modernitas yang selama ini di anggap bermasalah oleh para teoritikus mazhab Frankfurt. Kesadaran atas hubungan relasional antar manusia pada alam modernitas terpaku kepada rasionalitas instrumental yakni subjek dan objek, bagaimana keberadaan objek dihisap 'kadar' manfaat sebanyak-banyaknya untuk kepentingan subjek. Sementara Habermas dalam paradigma komunikasinya menghendaki lahirnya hubungan rasionalitas komunikasi yakni mengharmoniskan subjek dan subjek. Tidak ada satu pihak yang mendominasi namun keduanya saling mengambil peran dan berupaya menghasilkan keputusan yang intersubjektif.

Tujuan dari memahami konsep komunikasi Jurgen Habermas yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana proses komunikasi yang efektif dan mampu melahirkan relasi sosial budaya dan struktur sosial yang harmonis dalam konteks masyarakat modern dalam iklim demokrasi. Sehingga relasi struktur sosial tidak menghendaki munculnya dominasi perorangan namun menjunjung tinggi hak-hak partisipatif.

Misalnya dalam konteks politik pembangunan sumber daya manusia di Indonesia mengadopsi pemikiran demokrasi deliberatif Jurgen Habermas bisa memberikan pengaruh perspektif yang baik, agar terciptanya budaya demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Konsep komunikasi Jurgen Habermas akan diambil dari pokok-pokok pikiran 1) Demokrasi deliberatif dan 2) Tindakan Komunikatif.

II. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, ini ditujukan untuk memahami fenomena objek yang diteliti, sehingga dapat dipahami bagaimana persepsi, gambaran perilaku, motif serta tujuan yang ingin dicapai oleh objek dengan pengejawantahan melalui narasi dan Bahasa yang tetap merujuk pada metode (Moleong, 2018)

Sebagai penunjang inti studi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni mengkaji sejumlah bahan Pustaka yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan atau merekonstruksi wacana pikiran-pikiran Jurgen Habermas. Bahan-bahan yang dikaji adalah pemikiran dari teoritikus kritis modern Jurgen Habermas.

Habermas dipilih karena ia memiliki konsentrasi kajian yang menarik secara filosofis-praksis untuk mengembangkan perspektif pada Ilmu Komunikasi.

Selain itu dilakukan telaah atas bacaan dan menganalisis dengan menggunakan perspektif sesuai judul penelitian. Tahap selanjutnya dari metode ini yaitu Menyusun data dalam tulisan secara deskriptif analitis untuk menemukan hasil dari penelitian.

III. KERANGKA TEORITIS

Konsep Komunikasi

Pemahaman Mengenai Komunikasi

Menurut John R. Wenburg dan William W. Wilmot juga Kenneth K.

Sereno dan Edward M. Bodeken setidaknya ada tiga kerangka pemahaman komunikasi, yaitu 1) Komunikasi sebagai tindakan satu arah, proses penyampaian pesan searah dari seseorang atau Lembaga kepada seorang atau kelompok lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, pemahaman komunikasi ini oleh Michael Burgoon disebut “definisi berorientasi sumber” (*source oriented definition*). Disebut juga model komunikasi linier yang dicetuskan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver (1949) dalam buku *the mathematical of communication*. 2) Komunikasi sebagai interaksi, komunikasi dipahami sebagai proses aksi-reaksi, sebab-akibat, yang arahnya bergantian. Pemahaman ini dipandang lebih dinamis dari pada komunikasi satu arah. Unsur penting dalam komunikasi interaksi ialah *feedback* atau umpan balik. Dicituskan oleh Willbur Schramm (1954) disebut model komunikasi interaksional. 3) Komunikasi sebagai transaksi, komunikasi dipahami sebagai kegiatan menafsirkan perilaku orang lain. Ada proses *encoding* dan *decoding* pesan verbal maupun nonverbal. Semakin banyak peserta komunikasi maka transaksi yang terjadi semakin rumit. Pemahaman ini mirip dengan “definisi berorientasi penerima” (*receiver-oriented definition*), yaitu menekankan pada variabel-variabel yang berbeda yaitu penetima dan makna pesan bagi penerima. Penerimaan disini bersifat dua arah. Oleh Barnlund (pengembang) disebut sebagai model transaksional.

Dalam kajian Ilmu Komunikasi ketiga pemahaman komunikasi diatas bisa diartikulasikan sebagai bentuk model-model komunikasi.

Komunikasi Politik

Dalam konteks komunikasi politik Mutz (2005) menyebutkan bahwa politik komunikasi terkait dengan menjadikan warganegara sebagai pengelola informasi yang aktif dan mandiri, yang sebelumnya dalam bahasa Jakubowicz (1993) disebut sebagai “*senceiver*”, gabungan dari “*sender*” sekaligus “*receiver*” (pengirim dan penerima pesan). Kedua hal ini sangat erat dengan gagasan Habermas tentang “*public sphere*” ruang publik yang lepas dari tekanan kekuatan dominan, terutama dari tekanan pemerintah dan pasar (kapital) sehingga dapat terjadi sebuah interaksi komunikasi yang bebas dan (relative) rasional (lihat Habermas, 1993 & 1996). Menurut Effendi Ghazali konsep *public sphere* ini dapat lebih terjamin atau lebih terbuka peluang perwujudannya jika ditegakkan prinsip-prinsip “*variety of media*” (terdapatnya variasi media) dengan “*diversity in media ownership*” (keterbukaan dan keberagaman kepemilikan media) serta “*plurality of contents*” (kandungan atau isi media yang beraneka ragam). Semangat *public sphere* dalam pendekatan media mengharuskan lahirnya kajian dan pelaksanaan pada “*media responsibility*” dan “*media accountability*” (tanggung jawab dan akuntabilitas media; lihat McQuail 2003).

Sistem Pers

Sekurang-kurangnya ada empat sistem pers yang dianut oleh banyak negara, 1) sistem yang dikontrol sepenuhnya atau hampir seluruhnya oleh negara (*authoritarian system*) dan 2) sistem yang relatif bebas dan tidak dikontrol oleh negara (*libertarian system*). Dua lainnya dijelaskan dibawah ini:

- 1) Pers Otoritarian. Dikenal sebagai sistem tertua, lahir pada abad 15-16 pada masa pemerintahan absolut. Pers ini berfungsi sebagai penunjang negara (baca: kerajaan) untuk memajukan rakyat. Pemerintah menguasai sekaligus mengawasi media. Berbagai kejadian yang diberitakan, sepengetahuan, dikontrol dan dievaluasi oleh negara. Mussolini (Italia) dan Adolf Hitler (Jerman) permisalan pemimpin dan negara yang menguasai sistem pers otoriter (Nurudin, 2008).
- 2) Pers Libertarian. Tumbuh pada abad 17-18 M sebagai dampak dari revolusi industry, dan adanya tuntutan massif kebebasan pemikiran di negara barat yang familiar dengan sebutan *aufklarung* (pencerahan). Inti dari sistem ini memandang manusia mempunyai hak asasi dan meyakini bahwa manusia akan bisa mengembangkan pemikirannya secara baik jika diberi kebebasan. Manusia makhluk bebas yang dikarunai akal. Kontrol berlebih negara dipandang sebagai manifestasi “pemeriksaan” kebebasan berpikir. Oleh karenanya pers harus diberi tempat yang sebebas-bebasnya untuk membantu mencari kebenaran. (Nuruddin, 2008).
- 3) Ada Pers tanggung jawab sosial sebagai jawaban atas pers libertarian yang dinilai “kebablasan” memahami makna bebas.
- 4) Pers komunis. Pers menjadi alat atau organ partai yang berkuasa.

Segala sesuatu ditentukan oleh partai (baca: negara).

Kompetensi Komunikasi Aristoteles

Mengenai retorika Aristoteles mengungkapkan dua asumsi. Asumsi pertama Pembicara harus mempertimbangkan audiens mereka dan mengungkapkan sejumlah bukti dalam persentasi mereka. Bahwa hubungan antara pembicara dengan audiens harus diakui.

Bukti inartistic atau eksternal adalah yang tidak dibuat oleh pembicara. Mereka akan menyertakan kesaksian saksi atau dokumen yang ada (Griffin, 2018).

Asumsi kedua, yakni pertimbangan tiga bukti retorik; logika (*logos*), emosi (*pathos*), dan kredibilitas (*ethos*). *Ethos* mengacu pada karakter yang dirasakan, kecerdasan dan niat baik dari pembicara (West & Turner, 2010) menyangkut kredibilitas pembicara dengan kompetensi mauoun kelayakan yang dimilikinya (Widiastuti, 2017).

Pathos berkaitan dengan emosi yang ingin pendengar keluarkan oleh pembicara. Aristoteles berpendapat bahwa pendengar menjadi alat pembuktian Ketika melibatkan emosi, pendengar menilai secara berbeda Ketika mereka dipengaruhi oleh kegembiraan, rasa sakit, kebencian atau ketakutan (West & Turner, 2010). *Logos* adalah bukti logis yang disampaikan komunikator yang mencakup argument dan rasionalisasi mereka. Bagi Aristo, logos melibatkan penggunaan sejumlah praktik, termasuk menggunakan klaim logis dan bahasa yang jelas. Dalam memaparkan bukti-bukti logisnya, pembicara seringkali menggunakan fakta dan angka untuk meyakinkan audiens (Samuel-Azran, 2015) Aristoteles juga mengungkapkan jenis retorika deliberatif yakni retorika yang

memiliki unsur motivasi yang membawa pendengar menjadi lebih baik (Booth, 2004). Retorika deliberatif berusaha membujuk pendengar untuk mengambil atau berpaling dari tindakan tertentu (Atkins, 2018).

Demokrasi Deliberatif

Kata “deliberasi” berasal dari kata latin *deliberation* artinya konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Demokrasi bersifat deliberatif manakala suatu keputusan atau kebijakan publik telah melewati pengujian lewat konsultasi publik, dalam kosakata Habermas disebut diskursus publik. Jurgen Habermas menyebutkan demokrasi deliberatif ialah mensyaratkan hubungan komunikasi antara masyarakat dan negara (baca: pemimpin) lalu lebih dikenal dengan istilah ruang public (*public sphere*). Antara masyarakat dan negara terjadi dialektika-diskursus yang intensif sehingga menghasilkan keputusan bersama tidak sepihak. Pada dasarnya Habermas ingin menghendaki lahirnya demokrasi yang terorientasi kepada kualitas bukan sekedar kuantitas (baca: voting).

Demokrasi deliberatif merupakan suatu dialog antar mekanisme sosial, seperti dalam negara antara legislatif-eksekutif-yudikatif (konteks Indonesia), dalam struktur masyarakat; antar warga, warga dengan pemimpinnya, dan seterusnya. Dialog tersebut terbentuk dalam jaringan komunikasi publik yang bersifat formal dan informal dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada publik untuk berpartisipasi di luar kekuasaan administratif negara.

Habermas menyebutkan demokrasi mesti memiliki dimensi deliberatif, yaitu prakondisi dimana kebijakan publik harus disahkan terlebih dahulu dalam diskursus

publik, hak partisipatif masyarakat menjadi bagian yang tidak boleh hilang dalam proses demokrasi.

Proses demokrasi yang mengedepankan asas-asas kemanusiaan akan menghendaki lahirnya kebebasan berpendapat untuk mengutarakan hal-hal yang bersifat personal ataupun komunal dalam penentuan solusi atas beberapa persoalan sosial. Sehingga produk demokrasi (baca: kebijakan) tidak menjadi dominasi elit kekuasaan atau oligarki.

Habermas mengkritik model demokrasi perwakilan yang tidak menempatkan konstituen dalam proses penempatan hukum secara menyeluruh. Dalam model ini, konstituen hanya diberikan hak-hak untuk memilih calon anggota parlemen, lalu setelah itu selesailah perannya secara konstitusional. Demokrasi deliberatif menekankan hadirnya konsep *regerung der regierten* (Pemerintahan oleh yang diperintah).

Demokrasi deliberatif yang dicetuskan Habermas ingin mengatasi keringnya rasionalisme ala Barat dalam masyarakat kapitalisme-renta dimana rasio hanya bermakna dominatif melalui kerja yang behasrat tujuan ekonomik dan industri.

Dalam demokrasi deliberatif terdapat tiga prinsip utama; 1) Prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak terkait, 2) prinsip *reasonableness*, artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain, 3) Prinsip kebebasan, artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan dan gagasannya.

Negara dalam demokrasi deliberatif tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan politik dalam ruangan yang eksklusif-tertutup yang nyaman (*splendid isolation*) tetapi masyarakat sipil melalui media dan organisasi mesti vokal memainkan pengaruh dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan politik tersebut.

Dalam ilmu komunikasi ada istilah *two way traffic* yakni membangun komunikasi dua arah pada konsep partisipasi demokrasi deliberatif pun hal tersebut adalah ciri khas yang melekat.

Bagi model demokrasi deliberatif jauh lebih penting memastikan dengan cara manakah opini publik (yang bisa jadi merupakan opini masyarakat yang dianggap sah dan universal) terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh warga negara dapat mematuhi opini-opini tersebut. Dengan demikian, demokrasi deliberatif mengacu pada prosedur formasi opini dan aspirasi secara demokratis (Hardiman, 2009: 128-129).

Legitimasi pada demokrasi deliberatif bukan terletak pada fakta bahwa mayoritas telah diraih. Melainkan pada cara-cara meraihnya secara fair dan adil. Produk hukum mesti diuji secara secara diskursif oleh publik terlebih dahulu. Dengan kata lain, demokrasi deliberatif adalah suatu proses perolehan legitimasi melalui diskursivitas.

Konsistensi Habermas dalam memahami ‘ciri deliberatif’ sangat terlihat dari ide-ide yang fokusnya kepada egalitas, inklusifitas, intersubjektifitas, dan partisipasi. Keempat hal itu ciri yang dominan untuk mengoperasikan semangat demokrasi deliberatif.

Ruang Publik Pada Demokrasi Deliberatif.

Istilah “*public sphere*” atau ruang public lahir dari karya Habermas pada tahun 1989 melalui buku berjudul *The Structural Transformation of The Public Sphere*. Dalam karyanya, tujuan politik Habermas adalah mengajukan *the project of enlightenment* atau proyek pencerahan dengan merekonstruksi ruang publik yang demokratis. Habermas mendefinisikan ruang public “*as a domain of uncoerced conversation oriented toward a pragmatic accord*” (Habermas, 1962, trans. Burger 1989). Artinya setiap orang bebas masuk dan turut berbicara tanpa ada represifitas yang mengarah pada kesepakatan pragmatis dalam ruang publik.

Habermas (Hardiman, 2009) memaknai ruang public sebagai hakikat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah public yang terdiri dari warga negara dapat berlangsung.

Sifat egaliterian (baca: ruang publik yang setara) dalam demokrasi adalah nyawa terpenting untuk memastikan bahwa demokrasi berpijak pada nilai kemanusiaan, dimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menyampaikan idenya (Littlejohn, 2009). Menurut Habermas, demokrasi yang sehat bukan berpijak pada legitimasi suara mayoritas namun lebih kepada adanya proses diskusi melalui pertimbangan dan alasan yang rasional.

Ruang publik adalah orang-orang yang terdiri dari banyak elemen (sipil, swasta dll) berkumpul bersama sebagai publik dan mengartikulasikan kebutuhan kolektif mereka kepada negara atau elit struktur sosial.

Orang-orang melalui interaksi komunikasi mendorong lahirnya program, kebijakan dan produk hukum berdasarkan pertimbangan rasio dan kesepakatan atas kebenaran bersama (intersubjektifitas). Seorang sosiolog dari Kanada Erving Goffman menyebutkan bahwa masyarakat terbentuk karena adanya interaksi diantara anggotanya. Tanpa adanya interaksi maka akan sulit memahami dunia sosial. Interaksi adalah tindakan yang terletak pada tataran praktis bukan sekedar teoritis.

Dalam konteks komunikasi politik, ruang publik akan melahirkan kompetisi. Pandangan ini pertama diperkenalkan oleh Bentley (1908/1967) melalui pengamatannya terhadap politik Chicago, Bentley menyimpulkan bahwa esensi dari politik adalah aksi dari beragam kelompok atas kepentingannya masing-masing. Dengan demikian Bentley memandang politik sebagai sebuah proses interaksi antara kelompok-kelompok kepentingan. Hal ini yang diamini secara tidak langsung oleh Habermas bahwa produk politik modernitas akan melahirkan kompetisi kepentingan yang mesti dihadirkan ruang khusus (baca: *public sphere*) untuk mengawinkan satu kepentingan dengan kepentingan lainnya melalui jalan diskursus-dialektis.

Tindakan Komunikatif

Tindakan komunikatif menurut Habermas (Hardiman, 2009), masyarakat pada hakikatnya komunikatif, dan yang menentukan perubahan sosial bukanlah semata-mata perkembangan kekuatan produksi atau teknologi melainkan proses belajar dalam dimensi praktis-etis. Teknologi dan faktor objektif lain baru bisa mengubah masyarakat jika masyarakat mengintegrasikannya ke dalam tindakan

komunikatif yang memiliki logikanya tersendiri.

Dalam *world of view* masyarakat modern pertumbuhan perubahan sosial menjadikan aspek produksi dan teknologi adalah yang paling mendasar dalam mengukur perubahan, hal ini tentunya menghilangkan aspek yang penting lainnya yakni kemanusiaan. Di dalam diri manusia terdapat dinamika interaksional yang kita pahami sebagai tindakan-tindakan komunikasi.

Manusia dalam skema tindakan komunikatif memerankan peran penting untuk menentukan sejauhmana perubahan sosial bisa dilakukan. Manusia dan komunikatifnya dianggap lebih utama secara *value* dibanding produksi dan teknologi. Produksi dan teknologi dipergunakan hanya sebagai penunjang manusia dalam berkehidupan, berinteraksi-komunikasi.

Sosiolog George Hebert Mead (Krots, 2009) menyebut komunikasi sebagai bentuk aksi sosial dengan konsekuensi bagi peserta, situasi, masyarakat dan budaya. Mead juga menyebutkan tindakan komunikatif bekerja berdasarkan norma, aturan atau budaya yang telah disepakati bersama. “Kesepakatan bersama” adalah kata kunci dalam memahami tindakan komunikatif, kebenaran yang relevan pada masyarakat dalam struktur sosial adalah kebenaran intersubjektif yakni kebenaran yang terbangun dari narasi bersama para subjek-subjek (baca: masyarakat).

Kebenaran intersubjektif dalam konteks relasi sosial berupaya untuk menghadirkan sikap saling mengerti secara komprehensif. Komprehensif artinya mengaktualisasikan nilai perasaan, pikiran dan sifat-sifat kebersamaan menurut

William I. Gordon yang dikutip oleh Mulyana (2009: 76) “komunikasi secara ringkas dapat didefinisikan sebagai transaksi dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan”.

Keterhubungan manusia yang ada pada tindakan komunikatif tidak bersifat pasif namun proaktif yang pada penjelasan sebelumnya disebut sebagai partisipasi. Semua berpartisipasi untuk menghadirkan ruangan sosial yang di cita-citakan bersama. Hal ini sejalan dengan apa yang didefinisikan oleh Wilbur Schramm (1965) yang menyatakan bahwa komunikasi adalah proses dua arah dimana pengirim dan penerima bergiliran mengirim dan menerima pesan (partisipasi aktif).

Dalam penjelasannya lebih lanjut, Habermas menyebutkan bahwa

Communicative action can be understood as a circular process in which the actor is two things in one an initiator, who masters situations through actions for which he is accountable, and a product of the transtions surrounding him, of groups whose cohesion is based on solidarity to which he belongs, and of processes of socialization in which he is reared

Habermas berpendapat bahwa rasionalitas tidak hanya dimiliki oleh pengetahuan tertentu, tetapi dengan rasionalitas, individu sebagai subjek dapat berbicara dan bertindak memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Tindakan komunikatif merekonstruksi rasionalitas dengan menggunakan bahasa sebagai media untuk bertindak. Tindakan komunikatif sangat mengutamakan pemahaman bersama (*common understanding*) dengan menghindari ego-individu. Habermas menyebutnya

dengan sebutan hubungan bebas sederajat antara dua subjek.

Pemahaman bersama bisa terjadi berdasarkan paradigma rasionalisasi sosial yang mengedepankan subjek (baca: manusia) sebagai pemain utama dalam melakukan tindakan-tindakan komunikasi. Lalu bahasa menjadi *tools* terpenting untuk mengaktualisasikan praktik komunikasi. Ego individu bisa dihindarkan dengan mengedepankan kegiatan rasionalitas yang dominan.

Hubungan antara rasionalitas dan bahasa membuahkan empat klaim, yaitu pembicaraan itu harus jelas (tepat tapan yang dimaksud), benar (apa yang diungkapkan), jujur (tidak bohong) dan betul (yang dikatakan itu wajar).

Keempat hal tersebut disebut juga sebagai “kompetensi komunikasi” yang masuk dalam konsep tindakan komunikatif Habermas. 1) Klaim kebenaran (truth) yaitu kesepakatan tentang dunia alamiah dan objektif, 2) klaim ketepatan (rightness) yaitu kesepakatan tentang pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial, 3) klaim autentisitas / kejujuran (sincerity) yaitu kesepakatan tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang dan 4) klaim komprehensibilitas yaitu kemampuan menjelaskan klaim-klaim di atas dan mencapai kesepakatan atasnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN **Habermas dan Realitas Modernisme**

Habermas melihat kehidupan modernitas mesti kembali kepada dasar-dasar kemanusiaan. Didalam proyek modernisme yang memberi kemudahan bagi manusia ditandai dengan revolusi industri namun disisi lain justru mental industri tersebut memberikan budaya rasio yang instrumental, dimana akal hanya

berpacu kepada target-target industri, ekonomi dan bermental pragmatis.

Baginya rasio yang benar yaitu berpijak kepada kemanusiaan dan akan memberikan solusi baru bagi masyarakat modern. Dimana kegiatan yang instrumental tetap bisa dilaksanakan dalam ruang yang disebut “pekerjaan” untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup. Sementara agar manusia tetap berjalan sesuai tabiat dasar dirinya maka diperlukan ruang “komunikasi” untuk menghadirkan semangat interaksi yang intensif, saling memmanusiakan dan saling berpengertian satu sama lain.

Kita lihat bersama pada masyarakat yang hidup di perkotaan mereka begitu terilit pada aktivitas instrumental bagaimana diri mereka diberdayakan hanya untuk menghasilkan “sesuatu” (bersifat material). Kehidupan bertetangga yang semakin menurun, ditandai dengan munculnya banyak apartemen yang mengurangi interaksi manusia. Sementara pada hakikatnya manusia adalah makhluk berbicara, makhluk berinteraksi bukan untuk sesuatu yang bersifat basa-basi namun lebih dari itu untuk merasakan kebahagiaan lewat interaksi, komunikasi yang berkualitas.

Belum tuntas masalah diatas, paradigma masyarakat yang hari ini sangat “teknosentris” terorientasi kepada teknologi (sosial media) semakin memberikan jarak antar manusia untuk berinteraksi secara langsung meskipun nilai positifnya internet yang bersifat interkoneksi bisa memudahkan manusia untuk meluaskan jaringan interaksi komunikasinya.

Habermas dalam konteks realitas modernisme ingin memposisikan manusia sebagai makhluk agung yang mesti

dipertimbangkan segala sesuatunya, manusia bukan alat (objek manipulasi) untuk menciptakan sesuatu untuk kepuasan sebelah pihak. Manusia dengan segala dinamikanya baik internal maupun eksternal adalah makhluk superior tanpa sekat tingkatan yang membedakan (*equality*) yang memiliki peranan penting dalam memainkan keseimbangan dunia. Dalam interaksi antar manusia perlu terbangun sikap “saling memberi, saling menguntungkan, saling pengertian” tidak boleh ada pihak yang memaksakan untuk dimengerti lebih jauh dari itu ada pihak yang mengharapkan untung sendiri lalu merugikan yang lainnya.

Karakteristik Komunikasi Habermas

Corak komunikasi yang melekat pada sosok Habermas yaitu konsultasi atau musyawarah, disebut sebagai “deliberasi”. Musyawarah bisa juga diartikan berembuk, perundingan, dan mengeluarkan pendapat atau dialogis. Musyawarah merupakan salahsatu produk dari komunikasi partisipatif.

Komunikasi partisipatif memiliki orientasi untuk menemukan jalan keluar atau solusi yang cenderung bisa “disenangi” atau diterima banyak pihak. Meskipun dalam pelaksanaannya komunikasi partisipatif ini agak rumit dan memakan waktu namun dari segi kualitas komunikasi dan output bisa melahirkan hasil yang tingkat kebenaran dan kesepakatan yang tinggi.

Habermas menyadari relasi dalam iklim demokrasi modern motif untuk saling berkompetisi secara politis sangatlah tinggi oleh karenanya *spirit* saling menjatuhkan tidaklah relevan untuk membangun jaringan sosial yang harmonis oleh karenanya prinsip-prinsip dalam

musyawarah perlu diimplementasikan. Terlebih dalam jaringan dan kepentingan politik, pengakomodiran kepentingan dan penyebaran kekuasaan adalah tindakan yang dibenarkan dan diharuskan.

Dalam musyawarah memerlukan kompetensi rasio untuk menghadirkan sajian diskursus yang logis, analitik dan faktual. Tidak hanya itu musyawarah mengharuskan lahirnya sikap toleransi yang *ajeg* agar tetap tenang melihat sajian diskursus yang bersitegang satu sama lain. Keputusan sepihak adalah jalan buruk dalam jaringan struktur sosial, diskursus-dialektika dalam prinsip musyawarah adalah upaya membangun intensifitas keputusan bersama. Perdebatan (tukar pikiran) lebih baik daripada tunduk terhadap hal yang tidak disepakati oleh sebagian pihak. Bagi Habermas sang “ilmuwan’ kritis upaya pelestarian logika, rasio dan analisa adalah manifestasi penting manusia.

Musyawarah menyelipkan nilai-nilai egaliter yakni merasa sama setara dengan manusia lainnya. Tidak ada dominasi dan merasa paling superior. Ekspresi sikap egaliter akan melahirkan rasa saling menghormati satu sama lain, pada praktik komunikasi jika kedua belah pihak memiliki motif saling hormat maka komunikasi yang efektif lebih mudah dicapai. Sementara konflik dalam komunikasi di sebabkan oleh adanya pihak yang merasa paling superior, dorongan untuk menjatuhkan pihak yang bersebrangan dan ketiadaan keterbukaan diri. Nilai-nilai pada egaliteristik mampu memusnahkan ketiga hal tersebut.

Implementasi Ide Demokrasi Deliberatif Pada Pers

Pers memiliki peran penting untuk menjadi “bank partisipasi publik” yaitu tempat yang dijadikan sebagai penyalur aspirasi-inspirasi masyarakat untuk melestarikan kehidupan demokrasi yang berkualitas. Ide Habermas bahwa setiap kebijakan pemerintah wajib melalui pertimbangan publik yang solid-kolektivisme tentunya mesti ada ruangan seluas-luasnya untuk publik menyatakan pendapat/dukungan/bantahan salahsatunya melalui pers.

Pers yang diidamkan dalam demokrasi deliberatif khas Habermas peneliti melihat lebih dekat kepada pers libertarian, bebas-terbuka. Meskipun terdapat catatan mesti ada lembaga mandiri yang mengawasi kinerja pers, jadi tidak bebas sebebas-bebasnya. Pers libertarian memiliki keberpihakan kepada instrumen bebas berpendapat. Ruang negara yang formal dalam demokrasi yang kompleks tidak akan cukup menampung geliat diskursus mempertimbangkan-memperhitungkan kebijakan atau program pemerintah, oleh karenanya pers yang bebas terbuka akan menjadi wadah yang lumayan “lebar” untuk menampung itu semua.

Dalam pemahaman deliberatif, pers berfungsi tidak hanya sebagai penyampai aspirasi dari akar rumput namun mesti membentuk sistem yang terintegasi antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah ataupun produk hukum. Sehingga didalam pers mampu menghadirkan diskursus yang nyata antara masyarakat dan pemilik kebijakan formal. Begitupun dalam konteks marketing komunikasi politik, pers tidak hanya memasarkan ide dan program calon pejabat

(presiden, caleg dll) namun bisa menghubungkan narasi yang dibangun oleh calon pejabat dan juga masyarakat. Sehingga pada praktiknya pers akan berwujud sebagai representasi kehendak semua tingkatan struktur sosial. Sejauh ini pers (di Indonesia) masih memisahkan antara narasi yang dibangun elit pejabat dengan masyarakat. Lebih tepatnya pers yang mampu membuat formulasi kehendak semua pihak.

Kompetensi Komunikasi

Pada sesi ini peneliti ingin coba menganalisa sejauh mana relevansi ide mengenai “kompetensi komunikasi” Habermas selaras dengan tiga kompetensi retorika Aristoteles. Aristoteles mengungkap tiga fondasi penting dalam seseorang melakukan retorika (komunikasi) yang oleh peneliti disebut sebagai kompetensi retorika 1) Ethos, berkaitan hal-hal etis yang dimiliki oleh komunikator seperti kredibilitas, keajegan motif, kecerdasan jiwa. Bagian ethos ini selaras dengan napa yang disebut oleh Habermas sebagai “klaim autensitas” atau sincerity yaitu menyeleraskan antara perbuatan batin seseorang dengan ekspresi pada dunia nyata, hal ini disebut juga sebagai kejujuran dalam komunikasi. Habermas menekankan kejujuran sebagai perbuatan batin yang produknya bukanlah ciptaan sesaat atau pencitraan namun mesti alamiah sebagai komitmen terhadap nilai-nilai etis.

Kompetensi selanjutnya menurut Aristoteles adalah 2) Pathos, ialah bagaimana emosi hadir dalam perbuatan komunikasi pembicara, emosi yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, empati dan lain-lain yang mampu menunjang kelengkapan aktivitas

komunikasi. Kompetensi tersebut dalam argumentasi Habermas disebut sebagai “klaim komprehensibilitas” yaitu sebuah kemampuan untuk menjelaskan narasi komunikasi secara menyeluruh dan mampu mencapai kesepakatan atasnya. Hal ini tentunya mesti menghadirkan emosi komunikator agar suasana penyampaian pesan bisa mudah tersepakati dengan utuh “komprehensibilitas”.

Kompetensi ketiga yaitu 3) logos, merupakan bukti logis, argumentasi, rasionalisasi dalam menyampaikan pesan. Hal ini pada kompetensi Habermas melekat pada “klaim kebenaran” yakni bagaimana setiap orang dalam interaksi komunikasi memahami dunia objek yang dilihat dalam persepsi yang mirip-mirip atau tersepakati bersama hal ini tentunya diperlukan kemampuan logika untuk mampu menghubungkan banyak premis narasi sehingga mampu dipahami sebagai “sudut pandang” yang sama.

V. SIMPULAN

Habermas menggagas betapa pentingnya menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses komunikasi. Prinsip kesetaraan manusia menjadi bekal utama dalam menghadirkan komunikasi yang efektif.

Komunikasi mesti berpijak pada keistimewaan nalar manusia demi menghasilkan kesepakatan bersama yang berkualitas. Nalar tersebut harus bertujuan melestarikan relasi sosial kehidupan manusia yang harmonis bukan justru digunakan untuk memanipulasi manusia untuk dijadikan alat teknologi, ekonomi dan industri kapitalisme yang justru melahirkan gontok-gontokan antar manusia.

Hak partisipasi publik adalah jaminan penting untuk mengupayakan

lahirnya kehidupan bersama dalam naungan demokrasi yang sehat. Dominasi perorangan/kelompok dalam pergaulan demokrasi adalah penyakit berbahaya. Partisipasi mesti bersifat jangka panjang (berkelanjutan) bukan sekedar partisipasi dalam ajang pemilu.

Kompetensi komunikasi yang bersifat etik, *logic* dan praktik adalah bekal dasar manusia untuk hidup dalam jaringan sosial yang memiliki kompleksitas. Gagasan Habermas dalam komunikasi memperlihatkan bukan hanya komunikator yang mesti piawai menyampaikan pesan namun juga komunikan mesti mudah (mengerti) menyerap pesan lalu melakukan timbal balik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- A, Agustianto. (2013). Komunikasi Dalam Dominasi Budaya Teori Kritis Menurut Jurgen Habermas. *Jurnal Ilmu Budaya*. Vol 09 no 2. Desember 2013: 75 – 83.
- Arnus, Sri Hadijah. (2015). Jejak Perkembangan Sistem Pers di Indonesia. *Jurnal Al-Munzir*. Vol 08 No 1. Mei 2015: 103 – 113.
- Esha, Muhammad In'am. (2013). Kepemimpinan di Era Demokrasi Deliberatif. *Jurnal El_Qudwah*. Vol. 08. No 2. Oktober 2013: 23 – 36.
- Fatkurohman. (2011). Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*. Vol IV No 2. November 2011: 37 – 58.
- Ghazali, Effendi. (2004). Interaksi Politik dan Media, Dari Komunikasi Politik Ke Politik Komunikasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI*. Vol 08 No 1. Juli 2004: 53 – 74).

- Haliim Wimmy. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Vol 42 (1) Juni 2016: 19 – 30.
- Harnowo, Tri. (2020). Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 32 No 1. Februari 2020: 55 – 72.
- Islami, Dian Ismi. (2013). Konsep Komunikasi Islam Dalam Sudut Pandang Formula Komunikasi Efektif. *Jurnal Wacana*. Vol XII No.1. Februari 2013: 40 – 66.
- Inayatillah, A.F. (2019). Penyimpangan Tindakan Komunikatif Habermas Dalam Cerpen “Sensasi Selebriti” Karya Sirikit Syah. *Jurnal Spektrum Komunikasi*. Vol 07 No1. Juni 2019: 42 – 50.
- Kirom, Syahrul. (2019). Individu Komunikatif Menurut Jurgen Habermas Dalam Perspektif Filsafat Manusia. *Jurnal Yaqzhan*. Vol 6 No 2. Desember 2020: 203 – 216.
- Nuris, Anwar. (2016). Tindakan Komunikatif: Sekilas Tentang Pemikiran Jurgen Habermas. *Jurnal Al-Balagh IAIN Surakarta*. Vol 1 No 1. Januari 2016: 40 – 66.
- Prasetyo, Antonius Galih. (2012). Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jurgen Habermas Tentang Ruang Publik. *Jurnal JSP Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 16 No 2. November 2012: 169 – 185.
- Rifa’I, Tsalis. (2015). Komunikasi Dalam Musyawarah, Tinjauan konsep asyura dalam islam. *Jurnal Chanel FSB UAD Yogya*. Vol 03 No 1. April 2015: 36 – 45.
- Samallo, Onis Jovico. (2021). Tindakan Komunikatif Bagi ADI-KAKA: Implikasi Pemikiran Jurgen Habermas Dalam Relasi Gandong Nusalaut Dan Ambalau. *KENOSIS; Jurnal Kajian Teologi*. Vol 7 No 1. Juni 2021: 90 – 106.
- Sari, Novieta Hardeani. (2013). Penerapan Manajemen Komunikasi Strategis Pada Model Demokrasi Deliberasi Dalam Menciptakan Kebijakan Publik Yang Tepat. *Jurnal Communication Spectrum*. Vol 3 No 1. Juli 2013: 83 – 101.
- Setyowati, Yuli. (2016). Tindakan Komunikatif Masyarakat “kampung preman” dalam proses pemberdayaan. *Jurnal ASPIKOM*. Vol 3 No 1. Juli 2016: 16 – 32.
- Siregar, Nina Siti Salmaniah. (2012). Interaksi Komunikasi Organisasi. *Jurnal Perspektif ilmu Sosial Fakultas Isipol UMA*. Vol. 05. No 1. April 2012: 27 – 40.
- Sholihah, Amilatu. (2021). Teori Kritis Dalam Paradigma Komunikasi Jurgen Habermas. *Jurnal Manthiq*. Vol VI Edisi 2. Desember 2021: 154 – 174.
- Wahidin, Unang. (2015). Interaksi Komunikasi Berbasis Media Pembelajaran Dalam Proses Belajar-Mengajar. *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*. Vol 04 No. 1. Januari 2015: 806 – 824.
- Xiao, Angeline. (2018). Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi, Teknologi dan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi, media dan informatika*. Vol 07 No 2. Agustus 2018: 94 – 99.

Buku

- Berger, Thomas dan Lawrence, Frederick, trans. Jargen Habermas “*The Structural Transformation of The Public Sphere*”.
- Griffin, J. (2018). *Customer Loyalty, Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan*. Alih Bahasa Dwi Kartini. Jakarta: Erlangga.
- Habermas, Jurgen. (1989). *Ruang Publik : Sebuah kategori tentang kategori*

- masyarakat Borjuis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- _____, (1984). *Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon, 1984.
- Hadirman, Budi. (2009). *Demokrasi Deliberatif : Menimbang “negara hukum” dan “ruang public” dalam teori diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta : Kanisius.
- _____, *Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Hasbi, Artani. (2001). *Musyawaharah dan Demokrasi*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- McQuail, Dennis. (2003). *Mass Communication Theory*. Britain: Alden Press.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Mutz, D. C. (2005) *Social trust, Public Opinion Quarterly*.
- Nurudin. (2008). *hubungan media konsep dan aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shannon dan Weaver, (1998). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta. Erlangga.